

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu permasalahan serius yang harus dihadapi dan dituntut untuk segera diselesaikan hingga saat ini yaitu masalah kemiskinan. Menurut Rustanto (2015 : 2) “fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan yang dialami individu, kelompok, dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum.” Kebutuhan standar hidup minimum tersebut seperti terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Di Indonesia sendiri persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019 (Badan Pusat Statistik/BPS : 2020).

Dari data yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini tentu disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu : faktor internal dan eksternal. Faktor internal berarti yang bersumber dari dalam diri seperti cara pandang seseorang terhadap

kemiskinan itu sendiri, mental diri maupun sikap yang mencukupkan diri pada keadaan miskin, tingkat pendidikan yang rendah, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal meliputi lapangan kerja sempit, kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada orang miskin, akses orang miskin untuk mendapatkan layanan pemerintah susah, dan lain-lain. Dengan demikian kemiskinan itu merupakan patologi yang dalam penyelesaiannya harus menyeluruh. Sebab masalah kemiskinan ini bersifat kompleks dan multidimensial. Dikatakan kompleks karena kemiskinan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan saling ada keterkaitan antara satu hal dengan hal lainnya. Sedangkan dikatakan bersifat multidimensial artinya punya berbagai kemungkinan maupun segi. Saling berkaitan pula dengan berbagai aspek kehidupan, bukan hanya terkait masalah sosial dan ekonomi saja.

Di Kabupaten Pasuruan, jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 mencapai 141,09.000 dengan presentase penduduk miskin 8,68% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan : 2019). Angka tersebut tentunya bukan angka yang sedikit. Oleh karena itu perlu penanganan lebih lanjut untuk mengentaskan kemiskinan. Berbagai program telah dibuat oleh pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, meliputi : program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial dan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Contohnya: Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BPNT-D, Beras Sejahtera (Rastra), ada pula PKH. Salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Program PKH ini berada dibawah naungan Kementrian Sosial dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang sosial. Program ini berupaya untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/ atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018).

Desa Bayeman Kecamatan Gondang Wetan merupakan salah satu desa yang melaksanakan program keluarga harapan sejak tahun 2007. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan untuk calon penerima PKH diawali dengan penetapan calon penerima yang selanjutnya akan disebut sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penetapan calon ini dilakukan oleh pusat dengan target 10 juta setiap tahun. Data calon KPM ini diambil dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Selanjutnya akan dilakukan validasi data untuk mencocokkan data awal dengan keadaan yang sebenarnya dan juga melihat apakah calon KPM ini sesuai dengan syarat komponen PKH.

Kemudian setelah tahap validasi data, barulah calon KPM ini ditetapkan sebagai penerima PKH / biasa disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setelah menjadi KPM tentunya tidak dilepas begitu saja, disamping ada pencairan dana non tunai melalui kartu ATM yang biasa disebut KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial) juga dilakukan pendampingan. Kegiatan pendampingan ini dinamakan kegiatan FDS (*Family Development Session*) /

P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga). Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan edukasi berkelanjutan yang dapat memberikan pemahaman kepada KPM tentang pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, perlindungan anak dan pengasuhan lanjut usia dan disabilitas.

Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa kendala yang dapat menghambat pelaksanaan PKH, antara lain : Pertama, adanya kesenjangan sosial antara penerima PKH, ada penerima PKH yang sebenarnya bukan warga miskin justru mendapatkan bantuan. Sedangkan warga yang benar-benar miskin tidak mendapat bantuan PKH. Kedua, proses pendataan lama sedangkan tidak sedikit masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan PKH. Proses pendataan warga miskin mengacu pada Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS), sementara untuk pengusulan penerima PKH masuk dalam data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG). Terkait dengan warga miskin yang ingin mengurus PKH, pihak yang bersangkutan diminta untuk mengurus surat keterangan tidak mampu di kantor desa / kelurahan setempat. Permasalahan yang ketiga, butuh waktu lama dalam pengurusan ATM KPM, baik karena terblokir rusak, ganti pengurus, maupun ATM hilang, itu membutuhkan waktu yang lama untuk mengurusnya ke bank.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dengan mengacu pada Permensos Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Bayeman Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan secara rinci diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bayeman Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bayeman Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian keilmuan administrasi publik, dapat menjadi bahan evaluasi, dan dapat dijadikan sebagai referensi serta menambah informasi maupun pengetahuan mengenai

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Bayeman Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Bayeman dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, melalui penelitian ini peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Dapat pula menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terkait pelaksanaan program keluarga harapan dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada ilmu administrasi publik.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi kepada masyarakat maupun lingkungan sekitar mengenai Pelaksanaan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018.